



LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR : 22 TAHUN : 2004 SERI : A NOMOR : 3

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN

NOMOR 16 TAHUN 2004

TENTANG

PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2003

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEBUMEN,

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan telah berakhirnya Tahun Anggaran 2003, perlu dilakukan perhitungan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - b. bahwa hasil perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.



THE NATIONAL COUNCIL OF EDUCATIONAL RESEARCH AND TRAINING
NEW DELHI

REPORT OF THE
COMMISSIONER

FOR THE YEAR 1964-65

IN THE FIELD OF

TECHNICAL EDUCATION

Technical Education in India
The Commission was set up in 1962 to study the state of technical education in India and to recommend measures for its improvement. The Commission has held several public hearings and has received many suggestions from the public. It has also conducted extensive research and has held several conferences with the Government and the States. The Commission has submitted its report to the Government in 1965.

The Commission has found that technical education in India is in a state of stagnation. The number of institutions is increasing but the quality is poor. The curriculum is outdated and does not meet the needs of the industry. The Commission has recommended several measures for the improvement of technical education in India, including the reorganization of institutions, the improvement of the curriculum, and the strengthening of the management of technical education.

1965

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah, Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan mulai berlakunya Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950;
 2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3312), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3569)
 3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
 4. Undang-undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3688);

1. The first part of the document
describes the general situation
of the country and the
state of the economy.

2. The second part of the document
describes the situation in the
different regions of the country
and the state of the economy
in each of them.

3. The third part of the document
describes the situation in the
different sectors of the economy
and the state of the economy
in each of them.

4. The fourth part of the document
describes the situation in the
different social groups of the
country and the state of the
economy in each of them.

5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
7. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
8. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 4021) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4165);

1. ...
2. ...
3. ...

4. ...
5. ...
6. ...

7. ...
8. ...
9. ...

10. ...
11. ...
12. ...

13. ...
14. ...
15. ...
16. ...
17. ...
18. ...
19. ...
20. ...

10. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2000 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 204, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4024);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4027);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4028);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 110 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 211, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4029);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138);

1. ...
2. ...
3. ...
4. ...
5. ...
6. ...
7. ...
8. ...
9. ...
10. ...
11. ...
12. ...
13. ...
14. ...
15. ...
16. ...
17. ...
18. ...
19. ...
20. ...

16. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 11 Tahun 2001 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggung-jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 13 Tahun 2001 tentang Pola Dasar Pembangunan Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2001-2005;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 17 Tahun 2002 tentang Program Pembangunan Daerah (Propeda) Kabupaten Kebumen Tahun 2002-2005;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 18 Tahun 2002 tentang Rencana Strategis Pembangunan Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2002-2005;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

1. Die ...
2. Die ...
3. Die ...

4. Die ...
5. Die ...
6. Die ...

7. Die ...
8. Die ...
9. Die ...
10. Die ...

11. Die ...
12. Die ...
13. Die ...

14. Die ...
15. Die ...
16. Die ...

17. Die ...
18. Die ...
19. Die ...

20. Die ...
21. Die ...
22. Die ...

23. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2003 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2003;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 14 Tahun 2003 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2003;
25. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen Nomor : 75/KPTS- DPRD/ 2001 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen.

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN
TENTANG PERHITUNGAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN
ANGGARAN 2003.

Pasal 1

Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2003 sebagai berikut :

a. PendapatanRp.413.249.832.191,00
b. BelanjaRp.441.376.490.593,00

Surplus (defisit)Rp. (18.126.658.402,00)

Handwritten notes or markings on the right edge of the page.



DAFTAR PUSTAKA
LAMPUNG

DAFTAR PUSTAKA

PERALATAN DAN BAHAN LABORATORIUM
FISIKA
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIC OF INDONESIA

Perangkat Lunak
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIC OF INDONESIA

c. Pembiayaan :

1. Penerimaan Rp.47.886.636.685,00
2. Pengeluaran Rp. 27.759.978.283,00

Surplus (defisit) Rp. 18.126.658.402,00

Pasal 2

- (1) Selisih Anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp.15.462.179.191,00 dengan perincian sebagai berikut :
 - a. Anggaran pendapatan setelah perubahan Rp.397.787.653.000,00
 - b. Realisasi Rp.413.249.832.191,00
 - Selisih lebih/(kurang) Rp. 15.462.179.191,00

- (2) Selisih anggaran terhadap realisasi belanja sejumlah Rp.12.638.474.407,00 dengan perincian sebagai berikut :
 - a. Anggaran belanja setelah perubahan Rp.444.014.965.000,00
 - b. Realisasi Rp.431.376.490.593,00
 - Selisih lebih/(kurang) Rp.(12.638.474.407,00)

- (3) Selisih anggaran dengan realisasi surplus/defisit sejumlah Rp.(28.100.653.598,00) dengan perincian sebagai berikut :
 - a. Surplus/defisit setelah perubahan Rp.(46.227.312.000,00)
 - b. Realisasi Rp.(18.126.658.402,00)
 - Selisih lebih/(kurang) Rp.(28.100.653.598,00)

- (4) Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan sejumlah Rp.28.100.653.598,00 dengan perincian sebagai berikut :
 - a. Penerimaan
 - 1). Setelah perubahan Rp. 47.313.312.000,00
 - 2). Realisasi Rp. 47.886.636.685,00
 - Selisih lebih/(kurang) Rp. 573.324.685,00

1. The first part of the document discusses the importance of maintaining accurate records of all transactions. It emphasizes that this is crucial for ensuring the integrity of the financial data and for facilitating the audit process.

2. The second part of the document outlines the specific procedures that should be followed when recording transactions. It details the steps from the initial receipt of the transaction to the final entry in the accounting system, highlighting the need for consistency and attention to detail.

3. The third part of the document addresses the role of internal controls in preventing errors and fraud. It discusses how a well-designed internal control system can provide a high level of assurance that the financial statements are free from material misstatements.

4. The fourth part of the document discusses the importance of regular reconciliations. It explains how reconciling accounts on a regular basis can help identify discrepancies early and ensure that the accounting records are up-to-date and accurate.

5. The fifth part of the document discusses the importance of maintaining proper documentation. It emphasizes that all transactions should be supported by appropriate evidence, such as invoices, receipts, and contracts, to ensure the reliability of the financial data.

b. Pengeluaran

| | |
|------------------------|-----------------------|
| 1). Setelah perubahan | Rp. 1.086.000.000,00 |
| 2) Realisasi | Rp. 29.759.978.283,00 |
| Selisih lebih/(kurang) | Rp. 28.673.978.283,00 |

Pasal 3

(1) Berdasarkan perhitungan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, posisi keuangan pada tanggal 31 Desember Tahun 2003 yang dituangkan dalam Neraca Daerah sebagai berikut :

| | |
|------------------------|--------------------------|
| a. Jumlah Aktiva | Rp.12.224.350.076.677,00 |
| b. Jumlah Utang | Rp. 1.204.552.766,00 |
| c. Jumlah Ekuitas Dana | Rp.12.243.145.523.911,00 |

(2) Berdasarkan perhitungan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, Saldo Kas Daerah pada tanggal 31 Desember tahun 2003 yang dituangkan dalam Laporan Aliran Kas sejumlah Rp.26.957.125.939,00, dengan perincian sebagai berikut :

| | |
|--------------------------|-----------------------|
| a. Saldo Kas 1 Jan 2003 | Rp. 47.678.375.987,00 |
| b. Juml.Penerimaan Kas | Rp.424.451.507.264,00 |
| | Rp.472.129.883.251,00 |
| c. Juml.Pengeluaran Kas | Rp.445.172.757.312,00 |
| d. Saldo Kas 31 Des 2003 | Rp. 26.957.125.939,00 |

Pasal 4

Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dijelaskan lebih lanjut tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini, yaitu :

1. Lampiran I : Laporan Perhitungan APBD

1. The first part of the document discusses the importance of maintaining accurate records of all transactions.

2. It is essential to ensure that all entries are supported by appropriate evidence and documentation.

3. The second part of the document outlines the various methods used to collect and analyze data.

4. These methods include both qualitative and quantitative approaches, each with its own strengths and limitations.

5. The third part of the document provides a detailed overview of the theoretical framework underlying the research.

6. This framework is based on a combination of established theories and new insights from recent research.

7. The fourth part of the document describes the specific procedures and protocols used in the study.

8. These procedures were designed to ensure the reliability and validity of the data collected.

9. The fifth part of the document presents the results of the study, which show a clear relationship between the variables.

10. Finally, the document concludes with a discussion of the implications of the findings and suggestions for future research.

11. The data collected during the study were analyzed using a variety of statistical techniques.

12. These techniques allowed for a thorough examination of the data and the identification of key trends.

13. The results of the analysis are presented in a series of tables and graphs, which clearly illustrate the findings.

14. The findings of the study have important implications for the field and provide a solid foundation for further research.

15. In conclusion, the study has shown that the relationship between the variables is both complex and significant.

16. The results of the study are consistent with the theoretical framework and provide a clear picture of the underlying mechanisms.

17. The study has also identified several areas for further research, which will help to refine the theoretical framework.

18. Overall, the study has made a significant contribution to the field and provides a valuable resource for researchers.

19. The findings of the study are discussed in detail in the following sections, which provide a comprehensive overview of the results.

20. The study has also identified several key findings, which are discussed in detail in the following sections.

2. Lampiran II : Nota Perhitungan APBD
3. Lampiran III : Laporan Aliran Kas
4. Lampiran IV : Neraca Daerah

Pasal 5

Lampiran-lampiran sebagaimana tersebut pada Pasal 4 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 6

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 29 April 2004

BUPATI KEBUMEN,

t.t.d

Dra. RUSTRININGSIH, M.Si

Diundangkan di Kebumen
pada tanggal 29 April 2004

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN

H. SUROSO, SH

Pembina Tingkat I

NIP. 010138040

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2004 NOMOR
22.

11

THE UNIVERSITY OF CHICAGO
DEPARTMENT OF CHEMISTRY
5800 S. UNIVERSITY AVENUE
CHICAGO, ILLINOIS 60637

RECEIVED
JAN 15 1964

FROM
DR. J. H. GOLDSTEIN

TO
DR. J. H. GOLDSTEIN

RE
POLYMERIZATION OF STYRENE

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

DEPARTMENT OF CHEMISTRY
5800 S. UNIVERSITY AVENUE
CHICAGO, ILLINOIS 60637

RECEIVED
JAN 15 1964

FROM
DR. J. H. GOLDSTEIN

TO
DR. J. H. GOLDSTEIN

RE
POLYMERIZATION OF STYRENE